

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Ditemukan Duplikasi Anggaran

### Penyusun Pidato Anies Dibayar Ratusan Juta

JAKARTA - Fantastis, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana anggaran untuk honorarium tenaga ahli Tim Penyusun Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp392 juta. Anggaran itu sudah diusulkan melalui Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2020 mendatang.

"Karena penghitungan kami masih menggunakan komponen lama. Dan sekarang menyesuaikan dengan perhitungan komponen baru," kata Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta, Mawardi, Rabu (6/11).

Bahkan, kata Mawardi, untuk anggaran tahun 2020 pihaknya tengah mengusulkan penambahan tenaga penyusun naskah. Yang tadinya hanya dua orang kini menjadi empat orang.

Kemudian untuk masalah honor, kata dia, sudah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur DKI nomor 1214 tahun 2019 tentang satuan biaya, gaji per bulan untuk penyusun naskah mencapai Rp8,2 juta. Sedangkan, gaji untuk penyusun naskah sebelumnya adalah Rp5 juta.

Menyangkut adanya temuan kejanggalan jumlah orang karena masih memakai komponen pembagiannya berbeda dengan tahun 2019 dengan yang diajukan di tahun 2020. Jumlah orang itu dihasilkan dari formula Rp392 juta dibagi Rp 5 juta lalu dibagi lagi untuk 12 bulan, hasilnya 6,5 orang.

Menurut Mawardi, adanya temuan kejanggalan jumlah 6,5 orang itu karena komponen pembagiannya berbeda antara tahun ini dengan yang diajukan tahun depan.

Jumlah 6,5 orang itu dihasilkan dari formula Rp392 juta dibagi Rp5 juta lalu dibagi kembali untuk 12 bulan. "Sehingga pembagiannya ketemu angka 6,5 orang," kata dia.

Seharusnya, kata dia, formulanya adalah gajinya diubah menjadi Rp8,2 juta seperti yang sudah diajukan. Kalau kenaikan upah dari Rp5 juta ke Rp 8,2 juta per bulan itu dasarnya karena Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta telah mengalami kenaikan. Makanya, upah itu mengalami kenaikan 8 persen lebih. "Semoga nanti sudah ada direvisi besarnya," jelas dia.

Di sisi lain, Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Rahmat menemukan adanya dugaan duplikasi anggaran dalam draf KUA-PPAS DKI Jakarta 2020.

Menurutnya, ada anggaran yang dinilai tumpang tindih di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. "IBC melihat, temuan itu bermasalah dan ternyata proses ini memboroskan anggaran," kata Rahmat di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019) lalu.

Rahmat menyebut, salah satu temuannya yakni anggaran Honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato atau Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wagub. Dalam anggaran tersebut, juga terdapat di anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri serta di Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu.

"Di KDH KLN honorarium tenaga ahli telah dianggarkan Rp390 juta. Anggaran ini juga ditemukan di Sudin Informatika Kepulauan Seribu, alokasinya Rp240 juta. Ini duplikasi anggaran," ungkap dia.

Jika dilihat dari variabel yang digunakan, jelas Rahmat, KDH mengusulkan angka Rp390 juta untuk 6,5 orang selama 12 bulan. Harga yang diberikan untuk per satu bulan sebesar Rp5 juta rupiah. "Ini juga tidak jelas, maksudnya seperti apa kok ada 6,5 orang, memangnya ada yang orang segitu," ungkap dia.

Dia menduga, dari pembuatan daftar anggaran di awal tersebut sangatlah buruk. Padahal, DKI cukup mempunyai waktu menganggarkan dana secara optimal.

Selain itu, ia mengapresiasi langkah PSI yang telah membuka anggaran ke publik. Menurut dia, ini bisa jadi cara pencegahan korupsi yang baik, mengingat tenggat waktu pembahasan yang sudah mulai selesai.

"Apalagi sempat disampaikan tinggal 2 bulan lagi. Ini jadi mitigasi potensi korupsi di RAPBD 2020. Karena, kami meyakini korupsi bisa terjadi kalau perencanaan sangat buruk," tandas dia.

Sementara itu, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan, penyusunan APBD di seluruh daerah harus berpedoman pada PP nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri nomor 33 tahun 2019. Dia menyebut proses penyusunan anggaran DKI sudah jauh melewati jadwal yang ditentukan.

Pertama, kata dia, DKI melanggar Pasal 90 PP 12/2019. Penyusunan KUA PPAS itu dimulai minggu kedua bulan Juli, dan harus diserahkan ke dean dokumen rancangannya.

Kemudian, kata dia, dibahas oleh dewan selama 1 bulan, sampai minggu kedua bulan Agustus. "Dari sini saja sudah dilanggar," kata dia.

Misbah menambahkan, soal pelanggaran juga ada dalam hal transparansi. Sepatutnya, Pemprov DKI, kata dia, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui APBD.

"Dan yang kedua soal transparansi, makna transparansi ini untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan memudahkan akses informasi soal APBD," tandas dia.



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Ditemukan Duplikasi Anggaran

### Soal Transparansi, Dewan Beda Pendapat

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta mengeluhkan soal transparansi anggaran Pemprov DKI Jakarta. Namun, hal itu disanggah oleh Fraksi Partai Gerindra, bila rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 berjalan dengan transparan.

"Kami mengeluhkan transparansi anggaran Pemprov DKI Jakarta," ungkap Zita Anjani, anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Pasalnya, sambung wakil ketua DPRD DKI Jakarta itu, materi usulan anggaran baru diterima anggota dewan beberapa menit sebelum rapat masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berlangsung.

Hal ini pun menyebabkan pembahasan anggaran yang dilakukan antara SKPD dengan komisi-komisi di DPRD DKI tidak bisa berjalan maksimal. "Saya kurang puas karena dokumen KUA-PPAS harus dianalisa betul. Tapi, enggak

mungkin dong H-1 menit kita analisa itu," ucapn Zita.

Ia pun menyebut, anggaran lem aibon yang beberapa waktu sempat menjadi sorotan publik merupakan contoh kecil anggaran janggal dalam KUA-PPAS itu.

"Lem aibon itu kecil. Baru puncaknya saja dari gunung es permasalahan transparansi dan akuntabilitas di anggaran DKI. Masih banyak sekali permasalahan yang menjadi PR bersama perihal anggaran," ujar putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu.

Zita menyebut, Pemprov DKI harus menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Pasal 33 tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan APBD harus berprinsipkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dia berharap, Pemprov DKI bisa menjalani komunikasi dan sinergitas yang baik dengan anggota dewan.

"Kalau begini terus, enggak ada trust, kita tidak bisa kerja. Dari kami itu maksimalkan fungsi DPRD. Kalau ngomong anggaran, kasih dokumen terkait, jangan kami disuruh raba-raba, ini apa ya," kata Zita.

Dengan demikian, Zita pun berharap fungsi DPRD, yaitu

anggaran, pengawasan dan Perda dapat dimaksimalkan.

"Kalau fungsi DPRD dimaksimalkan, DPRD punya wewenang untuk mengecek dan itu akan maksimal (kebijakan, Red) anggaran," imbuhnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyatakan, fraksinya di Kebon Sirih menyebut proses pembahasan rencana KUA-PPAS DKI Jakarta 2020 berjalan dengan transparan meski Pemprov DKI Jakarta tidak mengunggah rencana anggaran.

"Secara umum, seluruh komisi yang saya pahami sangat terbuka. Karena selalu pimpinan komisi mengatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Semua orang bisa pantau dan lihat," ucapnya saat konferensi pers di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Menurut wakil ketua DPRD DKI Jakarta itu, tidak ada rapat pembahasan anggaran yang ditutup-tutupi. Maka hal itu jadi parameter Gerindra menyebut anggaran transparan.

"Itu dasar dari apa yang kita katakan transparan dalam proses pembahasan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dikuliti satu per satu dari judul sampai angka," kata Taufik.

Hal ini, sambung dia, berbeda dengan beberapa fraksi, khususnya PSI yang meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengunggah rencana anggaran. Baginya, tidak ada kewajiban pemerintah daerah melakukan itu.

"Tapi bahwa sesuatu yang belum matang di-upload (malah, Red) jadi masalah itu. Kan belum ada pegangan hukumnya, justru menurut saya, kalau mau mendiskusikan di forum, jangan dilapor ke teman-teman wartawan gitu loh," tandas Taufik.

Ia mengaku, pernah menemukan kejanggalan anggaran. Namun, dia memilih menyampaikan langsung kepala pimpinan lembaga yang menanganinya. "Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp1,2 triliun, tapi saya nggak buka ke publik," tutur Taufik.

Bagi Taufik, membuka masalah rencana anggaran ke publik bukan sesuatu yang istimewa. Memang hal itu boleh dilakukan, namun tidak perlu berlebihan.

"Sebenarnya nggak ada yang istimewa, cuma genitnya saja yang buat saya harus dikurangi dikit. Nggak apa genit, boleh, nggak ada masalah," tukas dia. (dny/aen)